

# HUBUNGAN PERSEPSI POTENSI KORUPSI, DAYA SAING DAN KEMUDAHAN BERUSAHA SERTA DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (ANALISA DATA DARI SURVEI PERSEPSI KORUPSI)

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia,  
Jl. Mayjen Sutoyo No.2, Cawang, Jakarta 13630, Indonesia

Email: [posmahutasoit@gmail.com](mailto:posmahutasoit@gmail.com)

## ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk melihat apakah potensi korupsi yang diukur berbasis persepsi dapat menerangkan hubungan antara hambatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Persepsi korupsi memiliki keamatan dengan indikator insiden korupsi, probabilitas korupsi, dan alokasi biaya suap. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisa deskriptif dengan melihat hubungan antar variabel, yaitu persepsi potensi korupsi, potensi suap, daya saing, dan kemudahan berusaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi potensi korupsi memiliki hubungan kuat dengan persepsi daya saing dan kemudahan berusaha, tetapi belum memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

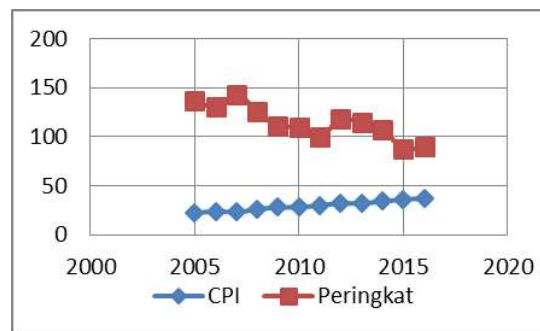
**Kata kunci :** Potensi korupsi, daya saing, kemudahan berusaha, pertumbuhan ekonomi, survei persepsi korupsi.

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025. Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, yakni: (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.[1]

Indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di tingkat

nasional diukur menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI) dan *National Integrity System* (NIS). Penggunaan CPI dan NIS sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dinilai tepat mengingat CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia. [2]



Catatan: Skor CPI=100 negara paling bersih, skor CPI=0 negara paling terkorupsi. Skor semakin besar semakin bersih (semakin tidak korupsi). Semakin rendah peringkat maka negara tersebut semakin bersih.

Gambar 1. *Corruption Perception Index* (CPI) dan Peringkat dari Indonesia [2]

Sebagai tindak lanjut atas rumusan Stranas PPK Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK. Dalam konteks Stranas PPK, daerah memiliki kewenangan dan aksi yang berbeda dengan nasional, sehingga menyediakan alat tera dampak implementasi aksi Stranas PPK dirasa perlu untuk mengukur risiko dan efektivitas Stranas PPK daerah. Pemberantasan dan pencegahan korupsi daerah dinilai berhasil jika terjadi kenaikan pada Indeks Persepsi Korupsi-Indonesia dan Sistem Integritas Lokal-Indonesia. [3]

Studi ini menggunakan Survei Persepsi Korupsi 2015. Persepsi masih merupakan penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Persepsi tidak hanya dihasilkan melalui penilaian subjektif yang cenderung personal, namun dihasilkan melalui penilaian objektif yang bersumber dari pengalaman langsung atau tidak langsung, dan/atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. [3]

Paper ini bertujuan untuk melihat apakah perilaku korupsi yang diukur berbasis persepsi, mampu menerangkan dampak terhadap halangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Persepsi korupsi memiliki keertan dengan indikator pengukuran korupsi lain baik yang berupa insiden korupsi, probabilitas korupsi, dan alokasi biaya suap. Dengan pengukuran persepsi korupsi ini, ingin membuktikan bahwa korupsi tidak hanya masalah bagi kemudahan berusaha, mendistorsi daya saing lokal, menurunkan integritas publik, dan menurunkan integritas bisnis. Korupsi secara jelas mengganggu program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan investasi.

## 2.LANDASAN TEORI

Menurut survei ACFE Indonesia (2016) [4] dalam Siregar (2017) [5], *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi. Korupsi dilihat sebagai jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan demikian terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yaitu: tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat; melawan norma-norma yang sah dan berlaku; penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya; demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau

lembaga instansi tertentu; dan merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Riyanto (2009) [6] mengatakan lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain; Kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan. Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Sopanah & Wahyudi (2007) [7] memberikan gambaran mengenai aspek perilaku individu. Sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau/ malas bekerja keras. Yamamah (2009) [8] menjelaskan bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”.

Saleh (2006) [9] merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di Indonesia, yakni faktor penegakan hukum, mental aparat, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya *political will*. Kemampuan lobi kelompok kepentingan dan pengusaha terhadap pejabat publik dengan menggunakan uang sogokan, hadiah, hibah dan berbagai bentuk pemberian yang mempunyai motif koruptif, masyarakat hanya menikmati sisa-sisa hasil pembangunan. Fakta ini memperlihatkan bahwa terjadinya korupsi sangat mungkin karena aspek peraturan perundang-undangan yang lemah atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Hardjapamekas (2008) [10] menyebutkan tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Utari (2011) [11] dalam Kennedy (2017) [12] menyebutkan perilaku korupsi dapat muncul dari

internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lemahnya aspek-aspek moral, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa berasal dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor hukum bisa lihat aspek perundang-undangan lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Namun korupsi saat ini dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Untuk organisasi dalam arti yang luas, korupsi terjadi karena terbukanya peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

#### *Sisi Permintaan Korupsi: Persepsi Potensi Korupsi [3]*

Potensi Korupsi adalah kondisi yang memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi. Potensi korupsi dapat terjadi akibat lima hal, yaitu prevalensi korupsi tinggi, rendahnya akuntabilitas pendanaan publik, tingginya motivasi korupsi, meluasnya sektor terdampak korupsi, dan efektivitas program antikorupsi di daerah.

Prevalensi korupsi adalah sebesar apa atau seberapa sering tindak pidana korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi terjadi di tingkat nasional atau local, dan/atau terjadi di kalangan pegawai nasional atau lokal. Akuntabilitas pendanaan publik adalah mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana publik. Seberapa jelas standard prosedur alokasi sumber daya publik, seberapa lazim alokasi non budgeter yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, apakah ada mekanisme rekrutmen

pejabat publik yang tidak transparan, apakah ada lembaga pengawas internal yang mengaudit keuangan publik, dan apakah ada independensi pengadilan yang menindak pejabat korup. Motivasi korupsi adalah dorongan seorang pejabat publik melakukan praktik tindak pidana korupsi. Misalnya, apakah praktik pemberian perlakuan istimewa terjadi, apakah praktik korupsi untuk memberikan donasi politik berlebih, apakah praktik korupsi menciptakan dana *off budget* untuk partai politik terjadi, praktik korupsi untuk mengamankan proyek pemerintah terjadi, praktik korupsi akibat jual beli pengaruh. Sektor terdampak korupsi adalah penilaian terhadap sektor publik apakah terjerat kasus korupsi. Sektor publik yang dinilai meliputi sektor perizinan, pelayanan dasar, perpajakan, pengadaan, peradilan, kuota perdagangan, kepolisian, perkreditan, bea cukai, lembaga pemeriksa, militer, eksekutif, dan legislatif. Efektivitas program anti korupsi adalah penilaian terhadap seberapa tingkat keberhasilan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pejabat korup terhadap penurunan risiko korupsi.[3]

Daerah dengan pertumbuhan indeks persepsi korupsi tinggi menunjukkan daerah yang bersangkutan memiliki kemajuan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerahnya. Sebaliknya, daerah yang cenderung stagnan/penurunan indeks persepsi korupsinya menunjukkan stagnasi/penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah.

#### *Sisi Penawaran Korupsi: Persepsi Potensi Suap [3]*

Jika potensi korupsi diukur sebagai pendekatan atas sisi permintaan korupsi, potensi suap diukur sebagai pendekatan atas sisi penawaran korupsi. Potensi Suap adalah penilaian terhadap seberapa besar dampak suap terhadap praktik dari prinsip bisnis yang adil. Secara spesifik potensi pembayaran suap dalam survei ini diidentifikasi melalui seberapa besar persentase kompetisi bisnis yang dimenangkan melalui praktik suap menyuap.

Potensi suap dihitung melalui dua cara, yaitu menghitung prevalensi dan jenis suap dan menghitung besar biaya suap. Penilaian prevalensi dan jenis suap dilakukan dengan menilai persepsi responden tentang: suap, uang pelicin, donasi politik, dan suap antar swasta. Perbedaan keempat jenis suap ini berdasar adanya perbedaan tentang gradasi nilai dan intensi pemberian suap. Kota dengan prevalensi tinggi untuk keempat jenis suap tersebut memiliki potensi suap tinggi, sebaliknya kota dengan prevalensi rendah untuk keempat jenis suap tersebut memiliki potensi suap rendah. Penilaian potensi suap berikutnya diperoleh melalui perhitungan rerata alokasi suap yang dibayarkan oleh perusahaan. Kota dengan rerata alokasi suap terbesar memiliki potensi suap tertinggi,

sebaliknya kota dengan alokasi suap rendah memiliki potensi suap yang rendah pula.

Perbedaan kapasitas ekonomi antar daerah mengakibatkan potensi dampak korupsi dan potensi suap berbeda. Daerah dengan potensi korupsi tinggi dan potensi suap tinggi memiliki potensi dampak ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, potensi korupsi dan potensi suap rendah memiliki potensi dampak ekonomi yang rendah.

*Persepsi Daya Saing* [3]

Daya saing lokal adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi ataupun meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di daerah. Penilaian daya saing lokal ini ditujukan untuk menentukan keunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain. Bagian penting dalam peningkatkan kualitas daya saing lokal adalah efektivitas pemberantasan korupsi daerah. Terdapat bukti empirik bahwa persepsi korupsi berhubungan erat dengan daya saing. Daerah dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing yang tinggi pula. Sebaliknya, daerah dengan indeks persepsi korupsi rendah memiliki daya saing yang rendah pula. [3]

*Persepsi Kemudahan Berusaha* [3]

Hambatan berusaha adalah kekuatan yang dinilai menghambat kemampuan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penilaian hambatan berusaha ini ditujukan untuk menilai faktor apa saja yang dinilai problematik saat menjalankan usaha di daerah. Sama halnya dengan daya saing lokal, bagian penting dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di daerah adalah efektivitas pemberantasan korupsi. Terdapat bukti secara empirik bahwa persepsi korupsi memiliki hubungan erat dengan kemudahan berusaha. Daerah dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki kemudahan berusaha yang tinggi pula. Sebaliknya daerah yang memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah memiliki kemudahan berusaha yang rendah pula. [3]

**3.METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan pada studi ini adalah analisa deskriptif dengan melihat hubungan antar variabel, yaitu persepsi potensi korupsi, potensi suap, daya saing, kemudahan berusaha, dan pertumbuhan ekonomi. Karena pengambilan datanya menurut persepsi responden maka alat pengujiannya menggunakan metodologi non parametrik, yaitu *Rank Spearman Test*. Seluruh data menggunakan hasil Survei Persepsi Korupsi 2015 yang dilakukan oleh Lembaga *Transparency International* Indonesia.

Berikut deskripsi mengenai pelaksanaan survei.

*Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi tahun 2015 oleh Lembaga Transparency International* [3]

Lembaga *Transparency International* Indonesia melakukan Survei Persepsi Korupsi 2015. Survei ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program anti korupsi dalam rangka pencapaian target-target Stranas PPK. Secara lebih khusus, Survei Persepsi Korupsi 2015 bertujuan untuk mengumpulkan data antar waktu dan antar kota yang dapat menggambarkan tentang daya saing dan hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; potensi suap dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas lokal, dan penilaian kinerja perekonomian daerah.

Survei Persepsi Korupsi dilaksanakan di sebelas kota di Indonesia. Pemilihan kota-kota tersebut pertimbangan sebagai berikut: Propinsi dimana kota survei berada memiliki kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto nasional; Kontribusinya produk domestik regional bruto propinsi dimana kota survei berada secara akumulatif mencapai hampir 70 persen produk domestik bruto nasional; Kota-kota dipilih mempertimbangkan area persebaran kegiatan ekonomi sesuai metode zonasi atau kawasan. Yakni kawasan Indonesia bagian barat, tengah dan timur.

Responden Survei Persepsi Korupsi 2015 adalah pengusaha. Pengusaha yang terpilih sebagai responden dalam survei ini adalah pengusaha yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan minimal satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, propinsi, kota, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam dua belas bulan terakhir. Total sampel pengusaha yang terlibat dalam survei sebanyak 1,067 pengusaha. Perusahaan masuk dalam kategori kecil jika memiliki jumlah pekerja hingga kurang atau sama dengan 49 pekerja, perusahaan masuk dalam kategori menengah jika memiliki jumlah pekerja antara 50 hingga 99 pekerja, dan perusahaan masuk dalam kategori besar jika memiliki jumlah pekerja di atas 100 pekerja.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *stratified random sampling*. Kerangka sampel pengusaha yang digunakan bersumber dari Direktori Perusahaan Industri 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan metoda: Perusahaan yang diambil sebagai sampel distratifikasi berdasarkan 3 (tiga) kriteria: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil; Alokasi sampel untuk masing-masing strata dilakukan menggunakan metode alokasi sama (*equal allocation*); dan Daerah pelaksana survei yang memiliki jumlah sampel kurang dari 100, maka kekurangan jumlah sampel dapat dipenuhi menggunakan metode *snowball* hingga jumlah minimal sampel terpenuhi.

Tabel 1. Distribusi Sampel Berdasar Survei 11 Kota dan Skala Usaha Responden

No	Kota	Jumlah Responden dari Perusahaan	TOTAL
----	------	----------------------------------	-------

		Kecil	Menengah	Besar	
1	Kota Manado	2	68	10	80
2	Kota Bandung	15	74	11	100
3	Kota Banjarmasin	4	94	2	100
4	Kota Jakarta Utara	39	41	20	100
5	Kota Makassar	32	50	19	101
6	Kota Medan	22	43	36	101
7	Kota Padang	11	79	10	100
8	Kota Pekanbaru	1	95	4	100
9	Kota Pontianak	2	94	4	100
10	Kota Semarang	30	49	21	100
11	Kota Surabaya	27	44	14	85
	Total	185	731	151	1,067*

Catatan: Jumlah total responden sebanyak 1.067 dikarenakan beberapa fakto di lapangan. Sumber: *Transparency International* [3]

Pengambilan data oleh *Transparency International* dilakukan melalui metode wawancara tatap muka dengan pengusaha dengan panduan kuesioner survei. Pengumpulan data Survei Persepsi Korupsi 2015 yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* dibantu oleh koordinator wilayah survei serentak di sebelas kota di Indonesia pada Mei – Juni 2015.

#### 4. ANALISA DATA

##### *Persepsi Potensi Korupsi* [3]

Dalam survei potensi korupsi akan ditinjau lima kategori, yaitu: prevalensi korupsi; akuntabilitas publik; motivasi korupsi; dampak korupsi; dan efektivitas pemberantasan korupsi. Potensi korupsi dinilai 0 jika sangat korup dan 100 jika sangat bersih. Dengan kategorisasi tersebut diketahui bahwa penyumbang utama skor potensi korupsi adalah efektivitas pemberantasan korupsi dengan skor 56, akuntabilitas publik dengan skor 56, sektor terdampak korupsi dengan skor 55, prevalensi korupsi dengan skor 53, dan diikuti oleh motivasi untuk korupsi dengan skor sebesar 52. Data dari tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Potensi Korupsi

No.	Kategori dan Unsur	2014	2015	2016 (harapan)
1.	Prevalensi korupsi	48	53	58
2.	Akuntabilitas keuangan	52	56	61
3.	Motivasi korupsi	47	52	58
4.	Sektor terdampak korupsi	50	55	61
5.	Pemberantasan dan pencegahan korupsi	52	56	64

Catatan: Potensi korupsi dinilai 0 jika sangat korup dan 100 jika sangat bersih. Sumber: *Transparency International* [3]

Berdasarkan fakta empiris tersebut, efektivitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pendanaan publik memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan potensi korupsi. Tidak kalah penting,

penurunan potensi korupsi juga disumbangkan oleh perbaikan persepsi terhadap sektor terdampak korupsi, penurunan prevalensi korupsi, dan penurunan motivasi korupsi.

Di tahun 2015 ini, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi tertinggi adalah Kota Banjarmasin dengan skor 68, Kota Surabaya dengan skor 65, dan Kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, Kota yang memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Kota Bandung dengan skor 39, Kota Pekanbaru dengan skor 42, dan Kota Makassar skor 48.

##### *Persepsi Potensi Suap* [3]

Berdasarkan prevalensi suap, kota yang memiliki prevalensi suap tertinggi adalah Kota Pontianak, Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Kota Manado. Sementara itu, kota yang memiliki prevalensi suap yang rendah adalah Kota Pekanbaru, Kota Makassar, dan Kota Semarang.

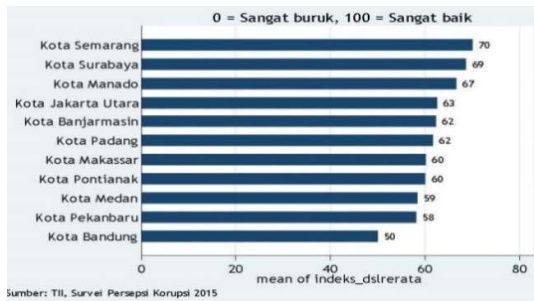
Berdasarkan rerata alokasi suap, Kota yang memiliki persentase suap tertinggi adalah Kota Banjarmasin sebesar 21% dari total biaya produksi, Kota Manado dengan rerata suap sebesar 15% dari total biaya produksi, dan Kota Bandung dengan rerata suap sebesar 12% total produksi. Sementara itu, kota yang memiliki persentase biaya suap terendah adalah kota Surabaya sebesar 1% dari total biaya produksi, kota Pontianak 1% dari total biaya produksi, dan kota Padang sebesar 3% dari total biaya produksi.

##### *Persepsi Daya Saing* [3]

Pengusaha sebagai responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap unsur daya saing daerah. Tiga unsur daya saing yang memiliki persentase tertinggi, responden yang menjawab cenderung buruk-sangat buruk, adalah inflasi, birokrasi, dan infrastruktur. Sementara itu, tiga unsur daya saing yang memiliki persentase terendah, responden yang menjawab cenderung buruk dan sangat buruk, adalah pendidikan, kesehatan, dan inovasi bisnis. Hal di atas mengindikasikan bahwa daerah sebenarnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih besar. Hal ini ditandai dengan membaiknya indikator-indikator dasar yang menjadi prasyarat pertumbuhan yakni kesehatan, pendidikan, dan inovasi. Namun, kapasitas pertumbuhan ekonomi tersebut berpeluang turun akibat buruknya pengendalian inflasi, biokrasi, dan buruknya kualitas infrastruktur.

Diantara kota yang disurvei, secara relatif, Kota Semarang dan Kota Surabaya menduduki peringkat teratas kota dengan persepsi daya saing lokal tertinggi. Sementara Kota Pekanbaru dan Kota Bandung menduduki peringkat terbawah kota dengan persepsi daya saing terendah. Peningkatan ini didasari atas

akumulasi skor masing-masing unsur daya saing di masing-masing kota. Kriteria penilaian daya saing tersebut adalah sebagai berikut 0 jika sangat buruk dan 100 jika sangat baik. Lihat gambar di bawah ini.



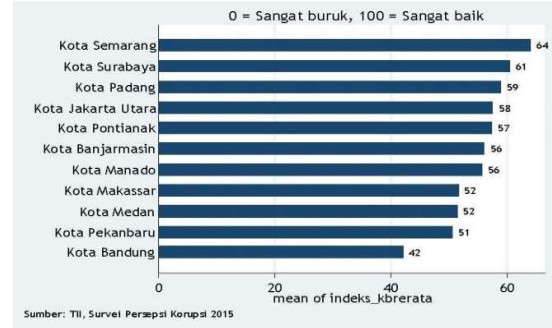
Gambar 2. Persepsi Pengusaha tentang Daya Saing Lokal [3]

*Persepsi Kemudahan Berusaha* [3]

Pengusaha sebagai responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap unsur penghambat daya saing tersebut. Tiga unsur yang memiliki persentase responden yang menjawab cenderung buruk dan sangat buruk tertinggi, adalah korupsi, kriminalitas, dan inflasi. Sementara itu, tiga unsur daya saing yang memiliki persentase responden yang menjawab cenderung buruk dan sangat buruk terendah, adalah konflik industrial, akses permodalan, dan infrastruktur.

Kondisi tersebut mengindikasikan merupakan faktor penghambat kemudahan berusaha di daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa konflik industrial, akses permodalan, dan infrastruktur di daerah bukan merupakan masalah dalam kemudahan berusaha. Yang diakui sebagai faktor kemudahan berusaha adalah korupsi di daerah. Hal ini menolak temuan dugaan sebagian orang yang menganggap bahwa praktik korupsi merupakan pelicin bagi pertumbuhan ekonomi.

Pengusaha diminta untuk menilai seberapa kuat unsur daya saing dengan kriteria 0 jika sangat buruk dan 100 jika sangat baik. Diantara daerah yang disurvei, secara relative, Kota Semarang dan Kota Surabaya menduduki peringkat teratas kota dengan persepsi kemudahan berusaha. Sementara Kota Pekanbaru dan Kota Bandung menduduki peringkat terbawah kota dengan persepsi kemudahan berusaha terendah. Peringkat ini didasari atas akumulasi skor masing-masing unsur kemudahan berusaha di masing-masing kota. Lihat gambar di bawah ini.



Gambar 3. Persepsi Pengusaha tentang Kemudahan Berusaha [3]

*E. Hubungan Persepsi Potensi Korupsi, Persepsi Daya Saing, Persepsi Kemudahan Berusaha dan Pertumbuhan Ekonomi*

Berikut tabel akumulasi data dari survei yang dilakukan oleh *Transparency International* pada tahun 2015. Data-data ini untuk melihat hubungan antara persepsi potensi korupsi dengan persepsi daya saing, persepsi kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3. Data Persepsi Korupsi, Persepsi Suap, Daya Saing, Kemudahan Berusaha dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kota	Persepsi Korupsi	Persepsi Suap	Daya Saing	Kemudahan Berusaha	Pertumbuhan* Ekonomi
Banjarmasin	68	21,1	62	56	6,1
Surabaya	65	1,5	69	61	6,47
Semarang	60	5,7	70	64	6,08
Pontianak	58	0,8	60	57	5,39
Medan	57	5,1	59	52	5,91
Jakarta Utara	57	6,8	63	58	4,60
Manado	55	15,1	67	56	6,52
Padang	50	3,2	62	59	6,45
Makassar	48	4,6	60	52	7,42
Pekanbaru	42	6,4	58	51	6,13
Bandung	39	12,3	50	42	7,66

Catatan: Angka terbesar memiliki prestasi yang lebih baik.  
 \*Pertumbuhan ekonomi rata-rata=(pertumbuhan2104 + pertumbuhan2015)/2. (Sumber: BPS Kota, 2015) [13]-[23]  
 Sumber: *Transparency International* [3]

Dari data di atas diuji hubungan antar variabelnya menggunakan *Rank Spearman*, yang memberikan luaran sebagai berikut:

Tabel 4. Korelasi antar Variabel

	Persepsi Korupsi	Daya Saing	Keterbukaan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi
Persepsi Korupsi		0,654** korelasi kuat	0,670** korelasi kuat	0,519 tidak ada hubungan
Daya Saing	0,654** korelasi kuat		0,876*** Korelasi sgt kuat	0,174 tidak ada hubungan

Keterbukaan Usaha	0,670** korelasi kuat	0,876*** korelasi sgt kuat		0,379 tidak ada hubungan
-------------------	--------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------

Sumber: hasil olah data menggunakan SPSS.

Dari hasil tes korelasi di atas terlihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara persepsi korupsi dengan daya saing dan keterbukaan usaha.

## 5.KESIMPULAN

Daerah dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing yang tinggi, sebaliknya daerah dengan indeks persepsi korupsi rendah memiliki daya saing yang rendah. Persepsi hambatan berusaha adalah kekuatan yang dapat menghambat kemampuan daerah untuk meningkatkan produksi di daerah. Korupsi dianggap dapat menghambat pengusaha bekerja dan berinvestasi sehingga daerah tidak dapat meningkatkan produksinya. Persepsi daya saing sangat berhubungan kuat dengan persepsi hambatan berusaha. Daerah tidak akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksinya jika terdapat persepsi hambatan berusaha yang buruk.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlihat memiliki hubungan dengan persepsi korupsi. Hal ini disebabkan perbedaan kapasitas ekonomi antar kota yang cukup tinggi di Indonesia. Kota yang pertumbuhan ekonominya tinggi menyebabkan banyak pengusaha dengan berbagai macam perilaku yang ingin menanamkan modalnya datang ke sana. Tidak semua perusahaan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Jadi untuk Indonesia belum bisa dikatakan wilayah dengan persepsi korupsi yang buruk akan menurunkan pertumbuhan ekonominya.

Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam upaya meredakan risiko korupsi di Indonesia. Pemerintah harus mampu menciptakan secara sistemik kebijakan-kebijakan anti korupsi agar dapat menarik investasi ke Indonesia, khususnya ke daerah-daerah. Tidak semua perusahaan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi perusahaan perlu terlebih dahulu memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi secara konsisten yang diwujudkan dalam implementasi sistem integritas perusahaan. Pengusaha juga seharusnya memiliki kebijakan dan sistem anti korupsi dalam perusahaannya agar terhindar dari risiko pemidanaan terhadap korporasi ataupun kehilangan reputasi baik. Masyarakat sipil juga perlu selalu memantau program-program pemerintah khususnya program anti korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2012). Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- Transparency International. *Corruption Perception Index*.
- Transparency International Indonesia. (2015). *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Danida.
- ACFE Indonesia Chapter #111. (2016). *Survei Fraud Indonesia*, Association of Certified fraud Examiners.
- Siregar, Santi Lina. (2017). Literature Review: Perilaku Korupsi dan Penyebabnya, *Fundamental Management Journal* ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online) Volume:2 No.1 April, p.47-56.
- Rianto, Bibit Samad (2009), *Undang-undang Pengadilan Tipikor dan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi*, dalam Amir Syarifudin, dkk (Penyunting) *Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, Republik Indonesia.
- Sopannah & Wahyudi, Isa (2004), *Analisa Anggaran Publik : Panduan TOT*, Jakarta: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika.
- Yamamah, Ansari. (2009). Diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi* <http://dellimanusantara.com/index.php>.
- Saleh, Abdul Rahman. "Korupsi Tergolong Extraordinary" <<http://www.arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Pinyuh&id=129619>>
- Hardjapamekas, Erry R. (2008). *Melawan Korupsi Tugas Kita Semua* <http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsip-hukum/365.html>
- Utari, Indah Sri. (2011). Faktor Penyebab Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kementrian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi
- Kennedy, Poma Sariguna Johnson & Siregar, Santi Lina. (2017). Para Pelaku Fraud di Indonesia menurut Survei Fraud

Badan Pusat Statistik Banjarmasin (2015)

Badan Pusat Statistik Surabaya (2015)

Badan Pusat Statistik Semarang (2015)

Badan Pusat Statistik Pontianak (2015)

Badan Pusat Statistik Medan (2015)

Badan Pusat Statistik Jakarta Utara (2015)

Badan Pusat Statistik Manado (2015)

Badan Pusat Statistik Padang (2015)

Badan Pusat Statistik Makasar (2015)

Badan Pusat Statistik Pekanbaru (2015)

Badan Pusat Statistik Bandung (2015)